



Judul : APBN Jadi pijakan visi Indonesia emas 2045
Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : B4

APBN Jadi Pijakan Visi Indonesia Emas 2045

APBN dinilai mampu mengoptimalkan tiga kunci utama yang dapat mendukung pencapaian visi Indonesia pada 2045. Tiga kunci tersebut ialah peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur nasional, dan peningkatan efektivitas institusional pemerintahan.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

VISI Indonesia menjadi negara maju pada 2045 menjadi ambisi jangka panjang yang diambil oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dipersiapkan untuk meraih visi tersebut. Salah satunya ditempuh melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Alat fiskal yang dimiliki pemerintah disiapkan untuk menjadi pijakan awal agar Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi 20 tahun mendatang. Fungsi alokasi pada APBN diharapkan dapat mengiringi dan mendongkrak kinerja perekonomian setiap tahunnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan mengungkapkan untuk menjadi negara maju berpenghasilan tinggi, ekonomi Indonesia setidaknya perlu di dorong untuk tumbuh secara inklusif.

Angka pertumbuhan 5%, menurutnya, tak cukup untuk menggapai visi besar tersebut. Ekonomi Indonesia setidaknya harus tumbuh di kisaran 6% hingga 7% setiap tahun guna naik kelas. Karenanya, kesinambungan alat fiskal negara menjadi penghantarpenting dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu diopang APBN yang efisien, akurat, dan kredibel," kata Sri Mulyani.

APBN juga dinilai mampu mengoptimalkan tiga kunci utama yang dapat mendukung pencapaian visi Indonesia pada 2045. Tiga kunci tersebut ialah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur nasional, dan peningkatan efektivitas institusional pemerintahan.

Peningkatan kualitas SDM

Pada peningkatan kualitas SDM, Bendahara Negara itu telah diwajibkan mengalokasikan 20% dari besaran belanja APBN untuk sektor pendidikan. Sektor tersebut merupakan poin penting dan utama dalam peningkatan kualitas SDM.

Dalam 10 tahun terakhir, misalnya, APBN telah memberikan beasiswa kepada 45.496 orang melalui Lembaga Pengciola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa itu memungkinkan putra-putri terbaik bangsa meraih pendidikan tinggi di berbagai universitas dunia.

Setidaknya realisasi belanja pendidikan pada APBN 2024 telah mencapai Rp173,4 triliun hingga April 2024, setara dengan 26,1% dari pagu sebesar Rp665,02 triliun. Realisasi itu naik 7% dari pencairan anggaran di bidang pendidikan pada periode yang sama 2023.

Realisasi belanja pendidikan tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat itu dicairkan melalui Kementerian Pendidikan sebesar Rp24,7 triliun. Uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan program Indonesia pintar (PIP) kepada 7,9 juta siswa dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah bagi 735,1 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS terhadap 120,3 ribu guru.

Kemudian, dana yang dicairkan melalui Kementerian Agama setara Rp21,1 triliun, antara lain untuk gaji pengajar, PIP untuk 1,5 juta siswa, KIP kuliah bagi 42,9 ribu mahasiswa, dan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi 4,4 juta siswa, serta realisasi program prakerja sebesar Rp1,3 triliun untuk 326,8 ribu peserta.

Penguatan infrastruktur

Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional nontol sepanjang 4.574 km dalam 10 tahun terakhir. APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, telah didukung dengan pembangunan 37 bendungan, serta peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatt (GW).

Adapun pada APBN 2024 anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp423,4 triliun, naik 5,8% dari 2023 yang tercatat sebesar Rp399,6 triliun. Anggaran infrastruktur 2024 sekaligus tercatat menjadi yang terbesar dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dana tersebut digunakan untuk biaya pembangunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, hingga pembangunan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dana infrastruktur pada 2024 dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru (DOB), pemberian penyetiaan modal negara (PMN) kepada BUMN di sektor infrastruktur, dan dukungan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Adapun realisasi anggaran infrastruktur hingga April 2024 mencapai Rp89,8 triliun, setara dengan 21,2% dari pagu APBN 2024. Pertumbuhan realisasi ini terbilang tajam lantaran mencapai 50,4% ketimbang periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp59,7 triliun.

Efektivitas institusi

Kunci lain untuk mengiringi pencapaian visi Indonesia emas 2045 ialah kualitas sistem legal dan birokrasi pemerintah. Sri Mulyani mengatakan institusi pemerintah tak hanya sekadar membuat aturan dan beragam regulasi untuk mendukung perekonomian bertumbuh.

"Membuat undang-undang ialah satu hal, mengimplementasikan secara bersih dan konsisten ialah hal lain yang berbeda. Dengan demokrasi yang terbuka di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana kita menggabungkan keterbukaan dan inklusivitas ini, tapi juga efektivitas dari pemerintahan," jelasnya. (E-2)